

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi selama masa pengamatan 2013-2023. Sedangkan variabel upah minimum dan indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan setiap tahunnya selama masa pengamatan tahun 2013-2023.
2. Secara parsial, peningkatan upah minimum memiliki dampak positif namun terbatas dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di DIY pada periode 2013-2023. Variabel upah minimum yang tidak signifikan menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan maupun pengentasan kemiskinan di DIY tidak dipengaruhi oleh upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut.
3. Secara parsial, variabel indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode 2013 hingga 2023. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik indeks pembangunan manusia di Provinsi DIY, akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan.
4. Secara parsial, peningkatan tingkat pengangguran secara langsung berkontribusi pada peningkatan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode 2013 hingga 2023. Korelasi positif yang signifikan antara tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan, mengindikasikan bahwa pengangguran merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi pada kemiskinan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang bisa diberikan oleh peneliti, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang berkaitan dengan kemiskinan dan memiliki pengaruh yang lebih komprehensif tentang faktor yang mempengaruhi kemiskinan
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan variabel yang hampir sama, diharapkan untuk memastikan kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan.
3. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan upah minimum tidak hanya ditetapkan, tetapi juga diterapkan secara efektif, termasuk pada sektor informal, melalui program subsidi atau insentif khusus.
4. Mengingat IPM menjadi variabel dominan yang berpengaruh pada penurunan kemiskinan, pemerintah perlu memperkuat sasaran investasi di bidang pendidikan (beasiswa, pelatihan keterampilan) dan kesehatan (akses layanan kesehatan murah).
5. Pemerintah dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor formal, melalui program kewirausahaan, pengembangan UMKM, dan kerja sama dengan sektor swasta.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis mengalami beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayahnya. Keberagaman pada kondisi sosial dan ekonomi Indonesia, penelitian ini hanya menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai wilayah yang dijadikan fokus objek penelitian.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel upah minimum, IPM dan Tingkat pengangguran terbuka dalam menganalisis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana masih ada variabel lain yang juga mempengaruhi terjadinya kemiskinan.

3. Penelitian ini hanya menggunakan data pada periode waktu tertentu dari tahun 2013-2023, dengan demikian untuk menggeneralisasi hasil dari penelitian pada periode waktu yang berbeda akan sulit.

5.4 Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan yang diperoleh dari penelitian ini berkaitan dengan peran upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka pada konteks pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

1. Analisis data menunjukkan tidak adanya korelasi signifikan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Peningkatan pada kualitas sumber daya manusia yang perlu dilakukan juga harus diikuti oleh peningkatan upah minimum yang layak bagi masyarakat.
2. Pada hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana ketika IPM meningkat maka kemiskinan di DIY akan menurun. Pemerintah dapat lebih memprioritaskan pembangunan manusia dengan peningkatan akses dan kualitas dari aspek pendidikan, kesehatan dan peningkatan pada pendapatan masyarakat. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan evaluasi mengenai kebijakan yang telah diambil dan jika dibutuhkan melakukan penyesuaian yang dilakukan secara berkala. Dengan memfokuskan pada pembangunan manusia secara berkelanjutan, pemerintah mampu mencapai tujuan dari pengentasan kemiskinan. Kebijakan yang efektif didasarkan pada data akurat, evaluasi secara berkala dan partisipasi yang aktif dari masyarakatnya.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di DIY. Hal ini berarti, peningkatan jumlah pengangguran secara langsung berkontribusi pada peningkatan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah perlu fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan baru baik sektor formal maupun informal, peningkatan keterampilan tenaga kerja dan memperkuat jaringan pengamanan sosial seperti Program Keluarga

Harapan (PKH). Dengan dilakukan upaya-upaya tersebut, masyarakat bisa mempunyai kesempatan lebih besar dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

